



[Year]



2021

LAPORAN
KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

KATA PENGANTAR

Seiring puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Kisaran. Berdasarkan data IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Kisaran Tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran adalah sebesar 112,69 % dari 10 Sasaran Strategis (SS) dengan total 19 IKU.

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Kisaran, Januari 2022
Kepala Kantor,



Agus Budianta
Agus Budianta
NIP. 19760803 199903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2021 terhadap Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 IKU, sebanyak 18 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi) dan 1 IKU berstatus kuning (tidak memenuhi ekspektasi) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,69%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2021 secara ringkas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%	85,71%	138,23%
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	159,28%	159,28%
	Persentase penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)	100%	107,01%	107,01%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87	91,37	105,02%
	Persentase realiasi pokok lelang	100%	139,43%	139,43%
Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,8	4,9	102,08%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100%	100%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100%	135,71%	135,71%
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	1,42%	193,55%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	107,14%	107,14%
	Persentase produktivitas lelang	35%	49,45%	141,29%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
	Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	12,50%	0,04%	199,66%
Edukasi yang Efektif	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90	93,97	104,41%
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100%	117,65%
SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
Organisasi yang <i>fit-for purpose</i>	Nilai hasil rewiu pengelolaan kinerja berbasis BSC	75	98,33	131,11%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,95	123,69%
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	94,90%	99,37%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Peran dan tugas yang diamanahkan kepada DJKN tersebut dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban KPKNL Kisaran dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari KPKNL Kisaran sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis KPKNL Kisaran.

B. Tugas dan Fungsi

KPKNL Kisaran merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi KPKNL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. pelaksanaan pelayanan penilaian
6. pelaksanaan pelayanan lelang
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”

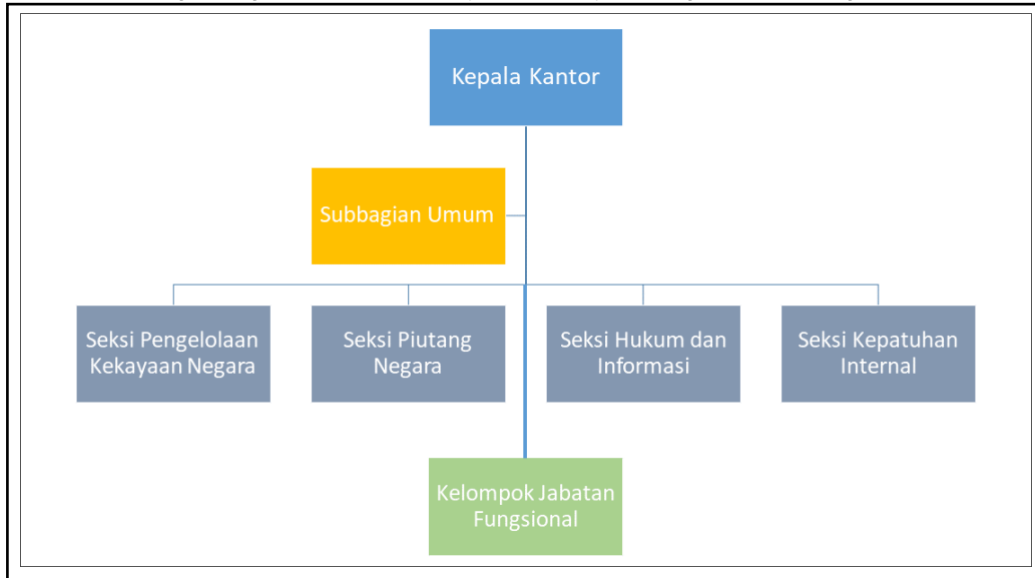
C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Subbagian Umum; | 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara |
| 3. Seksi Piutang Negara; | 4. Seksi Hukum dan Informasi |
| 5. Seksi Kepatuhan Internal | 6. Kelompok Jabatan Fungsional |

Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 di bawah ini:

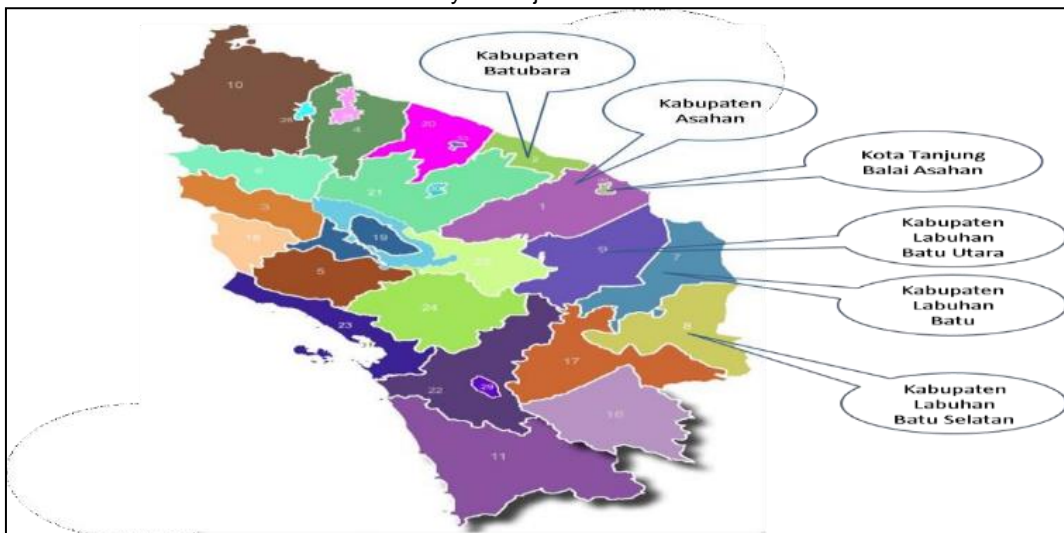
Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupaten yaitu:

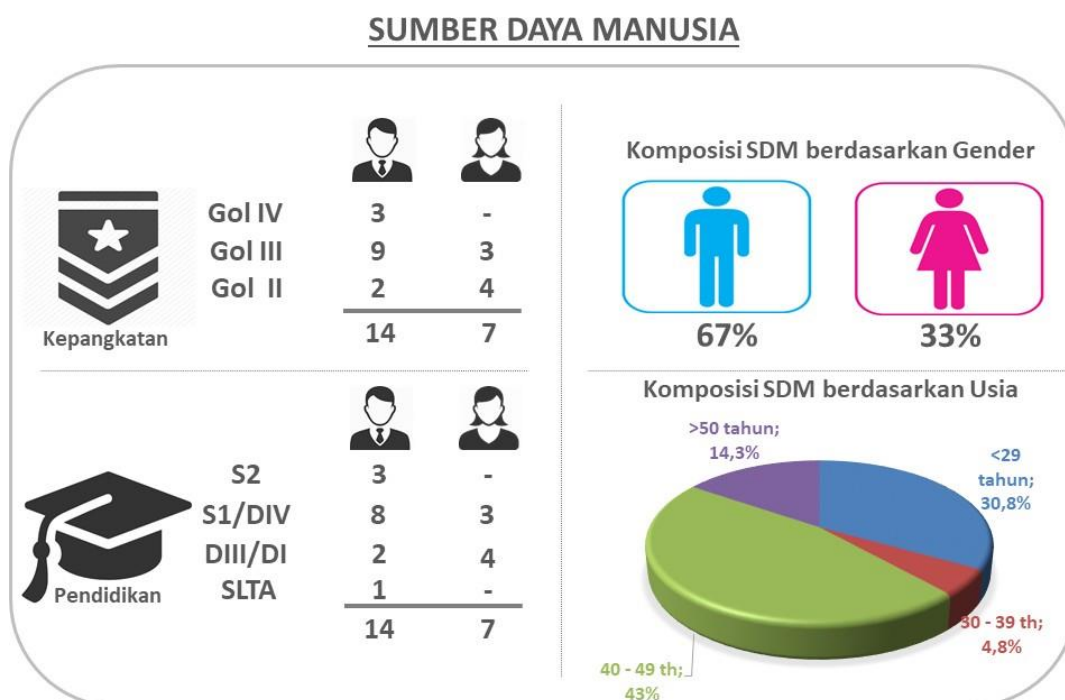
1. Kabupaten Asahan;
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kota Tanjungbalai;
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu
6. Kabupaten Batubara

Gambar 1.2
Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran



KPKNL Kisaran didukung oleh 21 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan



D. Isu Strategis

- Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan stakeholders di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor- 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Mengingat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai

dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra DJKN 2020-2024.

- c. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja juga harus mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

E. Sistematika Laporan

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun 2021;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Kisaran serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2021 yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja, KPKNL Kisaran berpedoman pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Rencana strategis tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. KPKNL Kisaran memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu:

'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien;

Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2020-2024 dalam

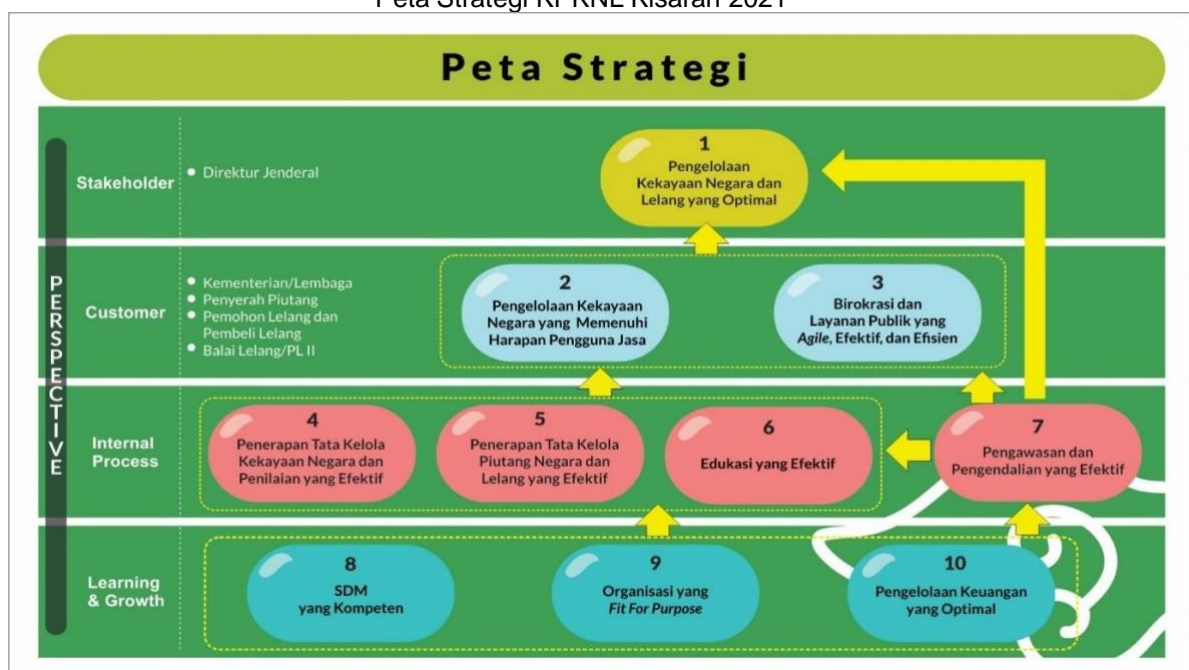
rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan social adalah:
 - Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, social, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal;
 - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - Komunikasi public yang efektif.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, perjanjian kinerja dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Kisaran Tahun 2020 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Kisaran.

Gambar 2.1
Peta Strategi KPKNL Kisaran 2021



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three*, KPKNL Kisaran pada tahun 2021 menerapkan 4 perspektif, 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Stakeholder

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis :

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila asset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), adanya nilai tambah BMN berupa penghematan (cost saving) dan PNBPN (revenue generating), tingginya turn over penggunaan BMN persediaan, serta mendatangkan manfaat ekonomi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	%	62
1.2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan KN dan lelang (PNBP)	%	100
1.3. Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara	%	100

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Customer Perspective

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1. Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	87
2.2. Persentase realisasi pokok lelang	%	100

Sasaran Strategis 3 : Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien

Pelayanan public yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan public yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu faktor yang merepresentasikan kualitas layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Ruang lingkup layanan yang diuji tingkat kepuasannya adalah layanan yang diberikan kepada pihak eksternal. Kualitas layanan dapat dikatakan prima adalah ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
IKU KPKNL Kisaran pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,8

Internal Process Perspective

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	%	100
4.2 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100
4.3 Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	22

Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan BMN, KNL, KND, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diataranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 4 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
IKU KPKNL Kisaran pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	%	100
5.2. Persentase produktivitas lelang	%	35
5.3. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	%	92
5.4. Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	%	12,5

Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi,
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	Indeks	90

Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7

Tabel 2.7
IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	85

Learning and Growth Perspective

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 8 : SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompentensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Kisaran.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.8

Tabel 2.8
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang *fit-for-purpose*

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9

Tabel 2.9
IKU KPKNL Kisaran pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1 Nilai review pengelolaan kinerja	Indeks	75
9.2 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	Indeks	82

Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan keuangan yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakain dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10

Tabel 2.10
IKU KPKNL Kisaran pada SS. 10

Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan KN dan lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	87
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2021
3	Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,8
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang akuntabel	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset)	100%
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%
		5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		5d-CP	Deviasi data PNBPN fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang <i>fit-to-purpose</i>	9a-N	Nilai rewiu pengelolaan kinerja	75
		9b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	82
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

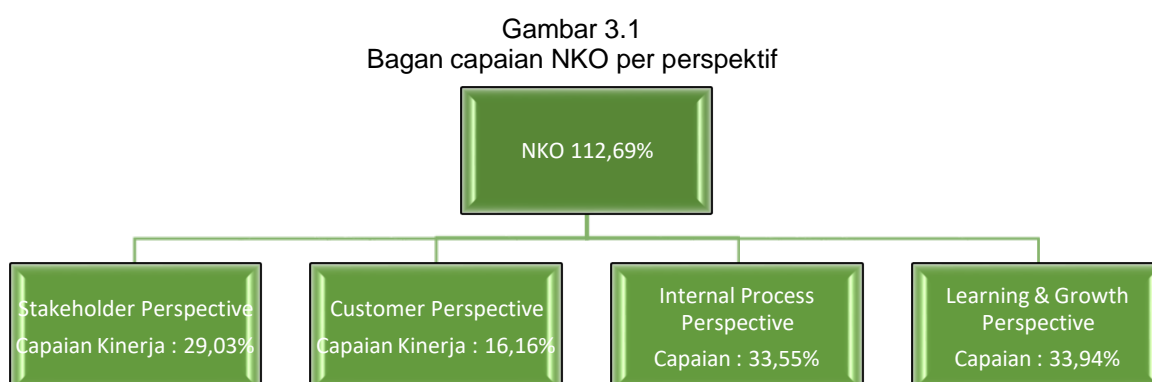
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

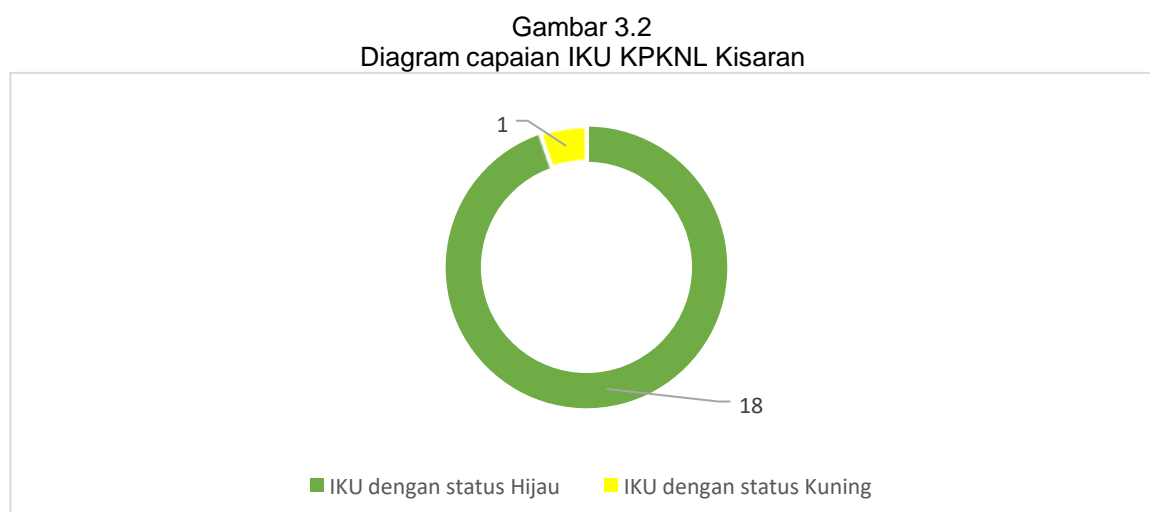
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran pada tahun 2021, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran adalah sebesar 112,69%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Selama tahun 2021, dari total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 18 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.



Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran pada tahun 2021 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

1. (1a-CP) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%	85,71%	138,23%

IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan salah satu tools untuk mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat..

Capaian IKU tersebut diukur melalui perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2021 sebesar 85,71% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 62%, sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 138,23%.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait SBSK;
- b. Satker kurang memahami pengisian form yang dibutuhkan dalam penghitungan/kertas kerja

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada satuan kerja mengenai peraturan BMN terkait SBSK, baik yang diselenggarakan oleh KPKNL maupun yang diselenggarakan oleh satuan kerja;
- b. Melakukan edukasi dan asistensi mengenai pengisian form;

Langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2021 antara lain:

- a. Sosialisasi melalui media zoom;
- b. Asistensi ke satker;

Isu Utama dan Implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 138,23%%.
2. Capaian atas IKU tersebut telah mencapai target *trajectory* (tahunan)
3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

Akar Masalah:

Mengingat IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan mempunyai korelasi yang erat dengan pemahaman satuan kerja, maka Seksi PKN KPKNL harus selalu melakukan bimbingan/asistensi dan mitigasi guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Telah dilaksanakan sosialisasi pada Triwulan IV tahun 2021.

Rekomendasi rencana aksi:

Melakukan sosialisasi pelaksanaan SBSK kepada satker yang menjadi target dan melakukan peninjauan lapangan yang direncanakan sebanyak 11 frekuensi dari bulan Februari s.d Desember 2022.

2. (1b-CP) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	2.535.000.000	4.037.676.951	159,28%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN
 - 1) penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L
- b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
 - 1) penerimaan dari pengurusan piutang negara
- c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)
 - 1) bea lelang;
 - 2) bea lelang pegadaian;
 - 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - 4) biaya permohonan lelang;
 - 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
 - 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
 - 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
 - 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp4.037.676.951,00 dari target sebesar Rp2.535.000.000,00 atau dalam capaian persentase sebesar 159,28% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Target dan Realisasi per komponen capaian
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2021
(dalam rupiah)

Jenis Capaian	Target	Realisasi	Persentase
Capaian PNBP Pengelolaan BMN	1.000.000.000	2.388.785.861	238,88%
Capaian PNBP PN	8.000.000	5.714.775	71,43%
Capaian PNBP Lelang	1.527.000.000	1.643.176.315	107,61%
Total	2.535.000.000	4.037.676.951	159,28%

Kendala dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama periode tahun 2021, yaitu:

1. Rendahnya tingkat harga sewa (seperti: kantin dan ATM) dan harga jual lelang
2. Rendahnya frekuensi penjualan di wilayah kerja KPKNL Kisaran.
3. sebagian besar BKPN tidak didukung oleh barang jaminan;
4. alamat debitur yang telah pindah dan tidak jelas (dibuktikan dengan sebagian besar surat pengurusan piutang negara yang telah dikirimkan kembali ke KPKNL Kisaran) serta tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang;

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2021 dengan melakukan:

1. Melakukan koordinasi dengan satker yang berpotensi terhadap PNBPN untuk mendorong Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
2. Penyampaian surat himbauan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
3. Melakukan monitoring terhadap satker yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pemanfaatan BMN.
4. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.
5. optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
6. penelitian dan penagihan langsung ke lapangan;
7. peningkatan tahap pengurusan melalui pengurusan piutang sederhana

Isu Utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya?)

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 159,28%.
2. Capaian atas IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah melampaui target *trajectory* (tahunan).
3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?):

Dari sisi capaian PNBPN pengelolaan BMN, target telah terlampaui, namun demikian capaian tersebut dapat lebih dioptimalkan jika harga sewa (seperti: kantin dan ATM) dan harga jual lelang ditingkatkan.

Sedangkan dari sisi capaian PNBPN Piutang Negara, factor sebagian besar BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang menghambat pencapaian target.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi ke satker dan stakeholder yang memiliki potensi PNBPN
2. optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
3. penelitian dan penagihan langsung ke lapangan;
4. penyelesaian hutang dengan keringanan melalui mekanisme crash program
5. peningkatan tahap pengurusan melalui pengurusan piutang sederhana

Rekomendasi rencana Aksi:

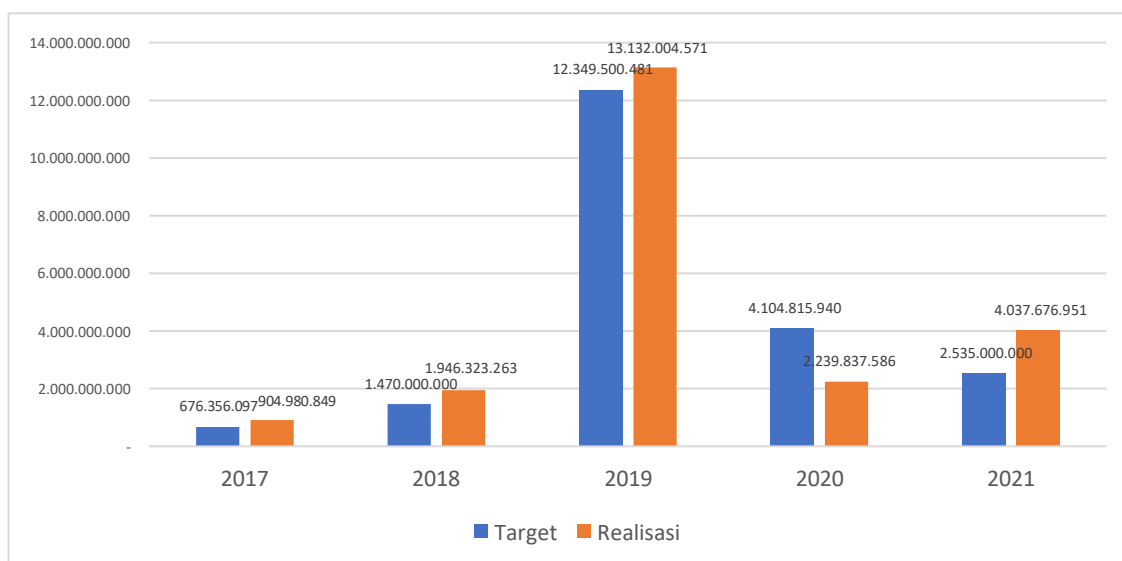
1. Melakukan penggalan potensi PNBPN dari pengelolaan BMN pada bulan Maret, Juni, Oktober, November, dan Desember 2022
2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL sebanyak 6 frekuensi, yaitu di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2022.
3. Melakukan 'jemput bola' untuk usulan sewa dan penjualan BMN pada satker yang berpotensi.
4. Clustering BKPN potensial pada bulan Januari dan Juli 2022
5. Penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur

Data historis target dan realisasi IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Periode Tahun 2017 sd. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	676.356.097	1.470.000.000	12.349.500.481	4.104.815.940	2.535.000.000
Realisasi	904.9803849	1.946.323.263	13.132.004.571	2.239.837.586	4.037.676.951

Gambar 3.3
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Manfaat Ekonomi
Periode Tahun 2017 sd. 2021



3. (1c-CP) Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase penurunan outstanding piutang negara	280.000.000	299.631.247	107,01%

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Capaian tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja disebabkan keberhasilan upaya penagihan yang dilakukan kepada debitur baik berupa pembayaran angsuran maupun pelunasan. Sedangkan terhadap debitur yang tidak ditemukan alamat/domisilinya telah ditetapkan PSBDT.

4. (2a-CP) Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87	91,37	105,02%

Waktu rata-rata penyelesaian permohonan *Standart Operating Procedure* (SOP) layanan unggulan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan KMK Nomor: 35/KMK.01/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan terdapat 2 (dua) layanan unggulan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan 1 (satu) layanan unggulan di bidang piutang negara yaitu:

- SOP Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL;
- SOP Persetujuan / Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL;
- Pelayanan permohonan keringanan utang pada KPKNL.

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 dengan target 87 dapat direalisasikan sebesar 91,37 sehingga capaian kinerja 105,02%.

Dalam pengelolaan kekayaan negara, adanya peningkatan frekuensi permohonan pengelolaan kekayaan negara baik PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan maupun persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah/dan atau bangunan diseimbangkan dengan peningkatan kompetensi pegawai melalui FGD di bidang pengelolaan kekayaan negara. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kualitas dan kesadaran pelayanan prima SDM yang ada di Seksi PKN.

Sedangkan terkait dengan bidang piutang negara terdapat kendala :

- Minimnya usulan dari penyerah utang terkait keringanan utang (kegiatan tergantung dari pihak luar).

Dan sebagai tindak lanjut serta langkah antisipasi dalam menangani IKU ini khususnya terkait bidang piutang negara adalah :

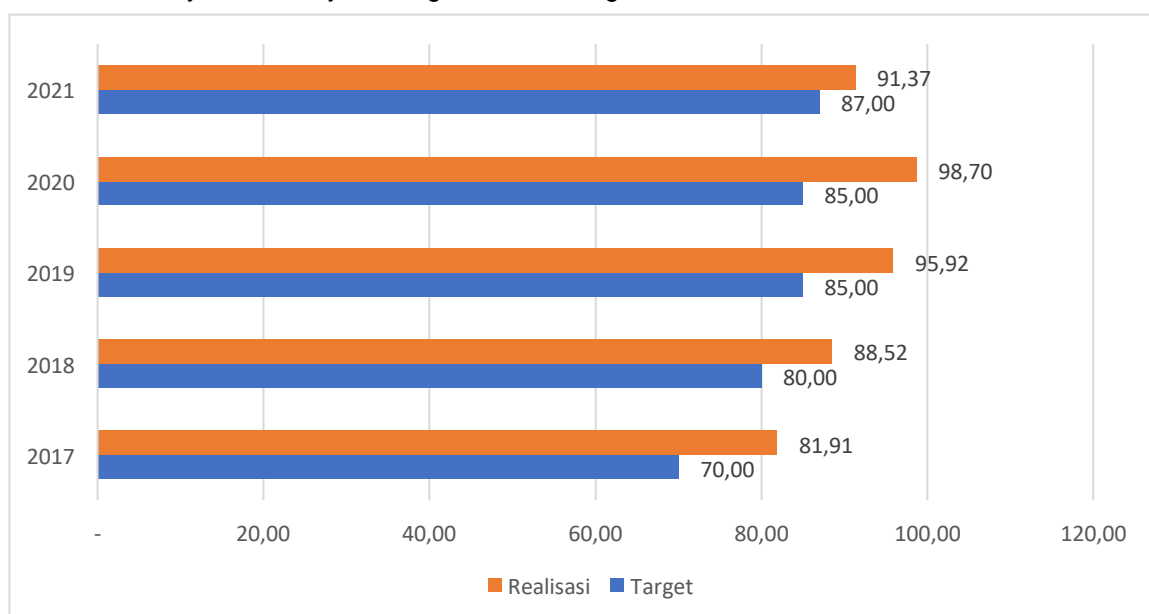
- a. Terkait laporan, KPKNL akan melakukan *review* kembali dan membuat resume secara lengkap terkait penanganan BKPn;
- b. Membantu proses pemeriksaan ke lapangan terkait barang jaminan dan penanganan BKPn (menyediakan perbantuan/pendampingan SDM ke satker).

Data historis target dan realisasi IKU Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang Periode Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	70	80	85	85	87
Realisasi	81,91	88,52	95,92	98,7	91,37
Persentase (%)	117,01%	110,65%	112,85%	116,12%	105,02%

Gambar 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang Periode Tahun 2017 - 2021



Isu Utama dan Implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara sebesar 105,02%.
2. Dalam rangka menghadapi target tahun 2021 dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara maka diperlukan adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan satker dan seksi terkait

Akar Masalah:

Potensi penyelesaian layanan unggulan melewati SOP

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melaksanakan FGD pengelolaan asset pada Triwulan IV Tahun 2021
2. Menyelesaikan layanan kekayaan negara lingkup KPKNL secara tepat waktu

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada bulan Mei dan September 2022
2. Melakukan internalisasi ke Seksi Hukum dan Informasi untuk menyelesaikan layanan kekayaan Negara secara tepat waktu pada bulan Maret 2022.

5. (2b-CP) Persentase realisasi pokok lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pokok lelang	44.000.000.000	61.349.442.490	139,43%

Pada tahun 2021, komponen IKU persentase hasil lelang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang dari KPKNL Kisaran dan Pegadaian.

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Sementara untuk bea lelang diperhitungkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Bea lelang yang diperhitungkan pada capaian IKU ini termasuk bea lelang pegadaian

Adapun target jumlah pokok lelang pada tahun 2021 pada KPKNL Kisaran adalah sebesar Rp44.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp61.349.442.490. KPKNL Kisaran sudah berupaya mengoptimalkan kinerja dari sumber daya yang ada pada seksi lelang dan jafung pelelang. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dan adanya klinik konsultasi lelang secara tetap muka dan non tatap muka demi meningkatkan koordinasi dengan antara KPKNL Kisaran dan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara serta Optimalisasi penggalan potensi lelang dan himbuan lelang *e-auction* secara berkesinambungan, hingga terwujudnya pelaksanaan lelang *e-auction* dengan frekuensi dan pokok lelang yang optimal menjadi kunci dalam keberhasilan pencapaian target lelang tersebut.

Tabel 3.4
Rincian Capaian persentase hasil lelang

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
Pokok Lelang Kelas I	20.000.000.000	20.206.514.390	101,03%
Pokok Lelang Pegadaian	24.000.000.000	41.142.928.100	171,43%
Rata-rata persentase			139,43%

Dalam pencapaian tersebut khususnya pelaksanaan lelang di lingkup KPKNL Kisaran, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya jenis barang yang dijual lelang dengan potensi membentuk harga yang tinggi.
- Jumlah barang terjual masih lebih sedikit dibanding barang tidak ada peminat.
- Frekuensi lelang noneksekusi sukarela yang belum optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi melalui surat dan kunjungan ke beberapa instansi/perusahaan potensial untuk mengenalkan lelang kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang dinilai potensial dan mempunyai pengaruh besar pada kegiatan bisnis di wilayah kerja KPKNL Kisaran.
- Melakukan sosialisasi dan penggalan potensi lelang kepada instansi yang memiliki barang dengan potensi nilai jual yang tinggi.
- Melakukan penyebaran pengetahuan tentang lelang kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi melalui media surat dan kunjungan ke instansi-instansi mengenai penjualan lelang noneksekusi sukarela yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL.

Dalam mitigasi kendala yang mungkin timbul pada periode yang akan datang, langkah antisipatif yang dilakukan adalah:

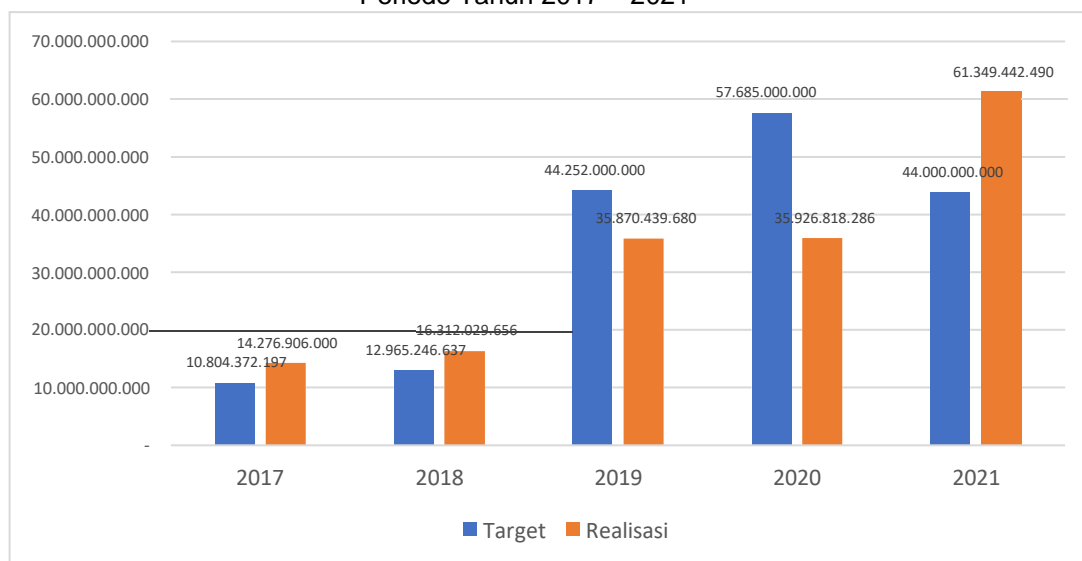
- a. Meningkatkan frekuensi sosialisasi lelang dengan memperluas sasaran sosialisasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sarana penjualan alternatif.
- b. Membuat target sosialisasi dan penggalian potensi lelang yang tepat sasaran, guna mendapatkan jumlah frekuensi lelang yang optimal selama tahun 2022.
- c. Melakukan pendekatan persuasif kepada calon pengguna jasa lelang yang potensial.
- d. Memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan dialog dengan masyarakat, khususnya mengenai kelebihan lelang agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan lelang.
- e. Memberikan perhatian lebih kepada calon pengguna jasa potensial jenis lelang noneksekusi sukarela, khususnya untuk pemohon BUMN, swasta perorangan dan badan hukum agar menggunakan lelang sebagai sarana penjualan aset/aktiva tidak aktifnya.
- f. Membangun database bidang lelang terkait kegiatan pembinaan, pengendalian mutu, dan pemeriksaan kinerja pejabat lelang.
- g. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan.
- h. Melakukan penggalian potensi lelang ke pengguna jasa pelayanan lelang perbankan maupun non perbankan, melakukan edukasi terkait lelang ke pengguna jasa lelang melalui sosialisasi pelaksanaan lelang khususnya lelang Hak Tanggungan, melakukan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku
- i. Meningkatkan koordinasi dengan perbankan untuk menyampaikan rencana lelang yang berpotensi laku per triwulan.

Data historis target dan realisasi IKU Pokok Lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Persentase Pokok Lelang
Periode Tahun 2017 – 2021

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
Pokok Lelang	Target	10.804.372.197	12.965.246.637	44.252.000.000	57.685.000.000	44.000.000.000
	Realisasi	14.276.906.000	16.312.029.656	35.870.439.680	35.926.818.286	61.349.442.490
	(%)	132,14%	125,81%	81,06%	62,28%	139,43%

Gambar 3.4
Diagram Perbandingan Persentase Pokok Lelang
Periode Tahun 2017 – 2021



Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase pokok lelang sebesar 139,43%.
2. Untuk periode Tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu tetap dimitigasi langkah-langkah untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah: Potensi masalah tidak ada peminat (TAP) terhadap pelaksanaan lelang

Tindakan yang telah dilakukan:

- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pemohon lelang pada Triwulan III Tahun 2021
- Menghimbau pemohon lelang untuk mengajukan barang yang *marketable*

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan penggalian potensi lelang selama tahun 2022
2. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara pada setiap bulan

6. (3a-CP) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

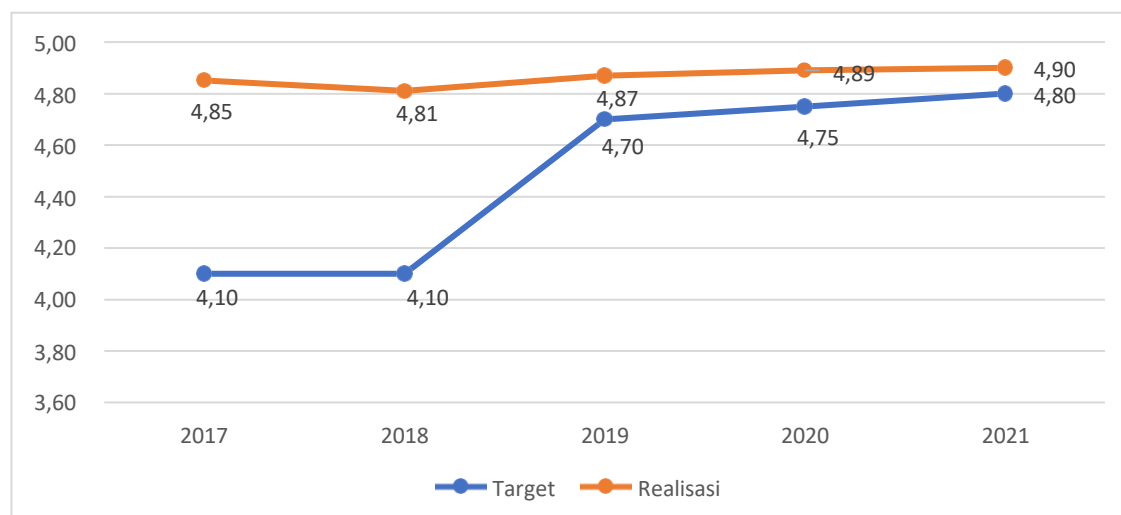
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,8	4,9	102,08

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen)

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 adalah sebesar 4,9 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 4,89. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pelayanan kepada Pengguna Barang/Satuan Kerja dengan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, layanan konsultasi, dan koordinasi dengan Pengguna Barang/Satuan Kerja, dengan memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku.

Data historis target dan realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Periode Tahun 2017 - 2021



Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- Kurangnya SDM di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- Kurangnya pemahaman tentang peraturan BMN.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi SDM baik dalam pelayanan maupun pemberian informasi;
- b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi BMN melalui media sosial seperti *whatsapp*;
- c. Melakukan *knowledge sharing* terkait peraturan BMN dan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) terkait permasalahan, rencana dan standarisasi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara;
- d. Melaksanakan *Quality Assurance* di bidang pengelolaan kekayaan negara

Dan sebagai langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2021 adalah :

- a. Mengadakan diskusi mengenai standarisasi pelayanan kepada *stakeholder* di di bidang pengelolaan kekayaan negara area pelayanan terpadu;
- b. Menyusun brosur/leaflet/banner tentang rekonsiliasi BMN, registrasi hibah, *e-auctoin*, pengurusan dan penyisihan piutang negara;
- c. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD serta *Quality Assurance* terkait pengelolaan kekayaan negara;
- d. Melibatkan SDM unit lain.

Isu Utama dan Implikasi:

Hasil survei atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk lingkup KPKNL Kisaran mencapai 4,9 dari target 4,8. Namun demikian Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit KPKNL Kisaran untuk kedepannya diprediksi akan mengalami kenaikan target. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat kepuasan pengguna layanan berpengaruh terhadap branding/reputasi KPKNL Kisaran dan organisasi DJKN secara menyeluruh.

Akar Masalah:

Menurut hasil survei, beberapa responden masih memberikan perspektif kepuasan dengan level cukup terhadap layanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan lelang dan Seksi PKN.

Berdasarkan *feedback* dari responden dan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, khususnya layanan unggulan di Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi PKN.

Area yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Seksi Pelayanan Lelang antara lain:

1. Peningkatan pemberian layanan konsultasi kepada calon/pemohon lelang
2. Penyediaan informasi terkait lelang yang komprehensif

Sedangkan area yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Seksi PKN antara lain:

1. Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN
2. Perlu adanya *taskforce* yang *standby* dengan durasi tertentu setelah jam kerja berakhir dalam rangka memberikan pelayanan di atas jam kerja
3. Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya
4. Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan untuk di *share* kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi di lingkup satker
5. Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) perlu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan FGD lelang pada Triwulan III Tahun 2021
2. Telah dilaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan asset pada Triwulan IV Tahun 2021.
3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan satuan kerja pada Bulan Desember 2021.
Rekomendasi rencana Aksi:
 1. Melaksanakan identifikasi dan mapping stakeholder pengguna layanan unggulan KPKNL Kisaran pada bulan Januari 2022
 2. Penyusunan Rencana Pelatihan/Sosialisasi/ FGD terkait pengelolaan BMN kepada satker pada bulan Januari 2022
 3. Penataan kembali Area Pelayanan Terpadu (APT) dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan APT pada bulan Januari 2022

7. (4a-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	162	162	100%

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat

2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
 3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
 4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
 5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
 6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.
- Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Capaian persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2021 adalah 162 dari target sebesar 162 atau capaian sebesar 100%. Jika dilihat dari sisi jumlah bidang tanah yang disertifikatkan, capaian ini meningkat hampir 8 kali lipat dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 (21 bidang tanah). Keberhasilan capaian ini antara lain dikarenakan data tanah yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP relatif terjaga validitasnya karena adanya dukungan dan sikap proaktif satuan kerja dalam penyajian data.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu terdapat bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan penerbitan sertipikatnya serta satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat dalam aplikasi SIMANTAP, sehingga hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut yaitu :

- a. Melaksanakan rapat pembahasan BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja;
- b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah; dan
- c. Melaksanakan rapat pembahasan BMN berupa tanah dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja.

Guna pencapaian yang lebih baik di tahun 2021, langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain:

- a. Koordinasi dengan satker yang memiliki bidang tanah yang belum disertipikatkan untuk menjadi pengganti terhadap tanah yang tidak dapat dilanjutkan penerbitan sertipikatnya.
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja wilayah untuk melakukan *updating* data SIMANTAP dan *update* aplikasi ke versi terbaru;

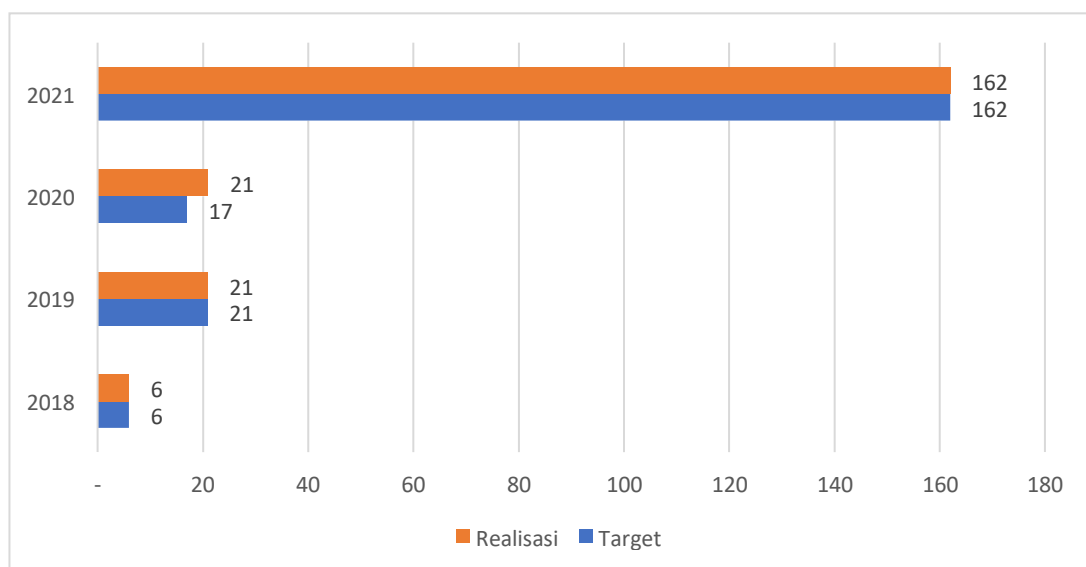
- c. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN berupa tanah Satuan Kerja.

Data historis target dan realisasi IKU persentase tanah BMN yang disertipikatkan pada KPKNL Kisaran tahun 2018 sampai dengan 2021 disajikan dalam table 3.5

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase tanah BMN yang disertipikatkan Tahun 2018 dengan 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Target	6	21	17	162
Realisasi	6	21	21	162
Kinerja (%)	100%	100%	123,53%	100%

Gambar 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase tanah BMN yang disertipikatkan Tahun 2018 sampai dengan 2021



Isu Utama dan Implikasi:

Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan sebesar 100%. Untuk periode Tahun 2022, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Akar Masalah:

Seluruh rencana aksi yang direkomendasikan pada DKO periode triwulan III dan IV telah dilaksanakan, sehingga mampu mendukung capaian kinerja IKU persentase

bidang tanah BMN yang disertifikatkan secara optimal, dapat diakselerasi mencapai target sebanyak 162 sertipikat. Selanjutnya, dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah tahun 2022 yang lebih menantang, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan Kantor Pertanahan, Kanwil BPN dan satker terkait.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a. KPKNL Kisaran telah menyusun mapping status progress sertifikasi (data rinci mengenai progress sertifikasi tanah berupa data tanah yang telah selesai sertifikasi, masih dalam proses, dan yang belum selesai).
- b. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tripartit dengan KPKNL, Kantor Pertanahan, dan satker terkait pada minggu pertama Bulan Desember 2021 dalam rangka mapping sertifikasi tahun 2022

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Mapping status sertifikasi periode tahun 2022
- b. Penyusunan Rencana Kerja Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah pada K/L Tahun 2022
- c. Rapat MoU Sertifikasi Ke Kanwil DJKN Sumatera Utara pada bulan Januari dan Oktober 2022
- d. Pemantauan Sertifikasi Ke Satker dan Kantah setiap bulan selama periode tahun 2022
- e. Penyusunan *trajectory*, *timeline* dan *monitoring progress* atas sertifikasi

8. (4b-CP) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	28	38	135,71%

IKU Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun.

Melalui evaluasi kinerja BMN, diharapkan dapat mewujudkan struktur portofolio aset negara yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui

rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian Evaluasi kinerja BMN tahun 2021 adalah 38 dari target sebanyak 28 atau secara persentase sebesar 135,71%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat untuk disajikan dalam laporan Monev BMN, sehingga hal tersebut perlu dilakukan tindak lanjut yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Satuan Kerja;
- b. Asistensi kepada satuan kerja

langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendukung capaian di tahun 2021 yaitu:

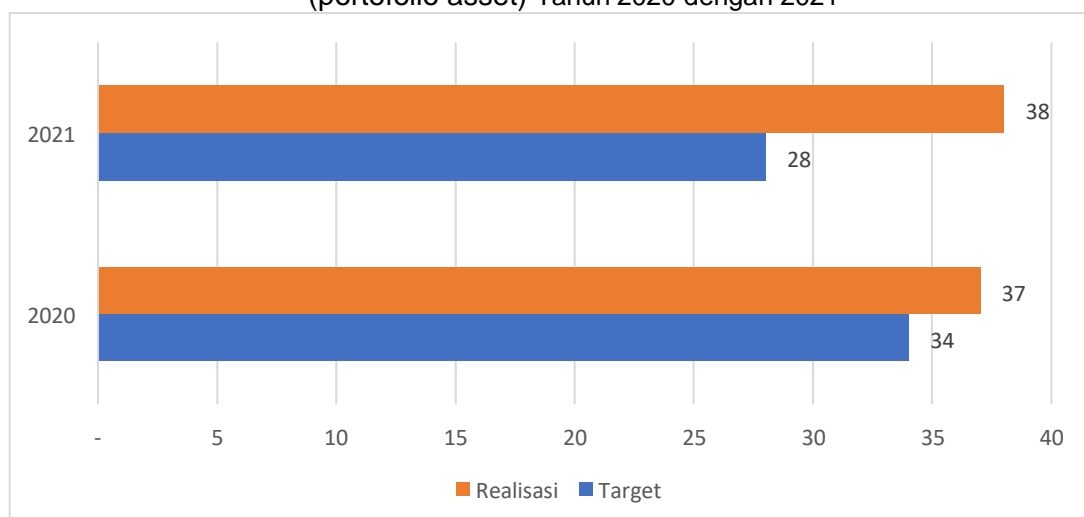
- a. Melakukan koordinasi dan edukasi kepada satuan kerja
- b. Menyampaikan himbauan kepada satuan kerja untuk melaksanakan pemetaan dan inventarisasi terkait pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing

Data historis target dan realisasi IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) pada KPKNL Kisaran tahun 2020 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) Tahun 2020 dengan 2021

Uraian	2020	2021
Target	34	28
Realisasi	37	38
Kinerja (%)	108,82%	135,71%

Gambar 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio asset) Tahun 2020 dengan 2021



Isu Utama dan Implikasi:

Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 135,71%. Untuk periode Tahun 2022, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Akar Masalah:

Seluruh rencana aksi yang direkomendasikan pada DKO periode triwulan III dan IV telah dilaksanakan, sehingga mampu mendukung capaian kinerja IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) secara optimal, dapat diakselerasi menjadi 38 aset (melebihi target tahunan).

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target tahun 2022 yang lebih menantang, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik dengan satker terkait.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi antara KPKNL Kisaran dan satuan kerja pada minggu pertama Triwulan III Tahun 2021.

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja
- b. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan satuan kerja
- c. Menyusun rekomendasi hasil kajian portofolio aset

9. (4c-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	1,42%	193,55%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2021 adalah 1,42% dari target 22% atau secara persentase sebesar 193,55%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja menyampaikan nilai usulan yang lebih tinggi dari hasil penilaian yang telah dilakukan Tim Penilai KPKNL. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi antara hasil penilaian dengan nilai persetujuan yang diterbitkan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

10. (5a-CP) Persentase efektivitas penyelesaian BKP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase efektivitas penyelesaian BKP	14	15	107,14%

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKP diukur dengan penjumlahan BKP Lunas, BKP Penarikan, BKP dikembalikan, dan BKP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKP target sebanyak 14 berkas BKP.

Capaian Persentase efektivitas penyelesaian BKP pada Tahun 2021 selain *effort* yang luar biasa dari KPKNL Kisaran, juga merupakan buah keberhasilan dari sinergi antara KPKNL Kisaran dan penyerah utang melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Aplikasi Focus PN yang membantu KPKNL untuk memetakan prioritas BKP yang diperkirakan cukup potensial guna menunjang capaian IKU;
- Pembinaan SDM pada KPKNL Kisaran terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara akurasi dan percepatan penyampaian data laporan sebagai salah satu instrument/alat ukur kinerja yang bersifat memberikan pedoman terhadap pengukuran kinerja dan efektifitas kegiatan KPKNL;

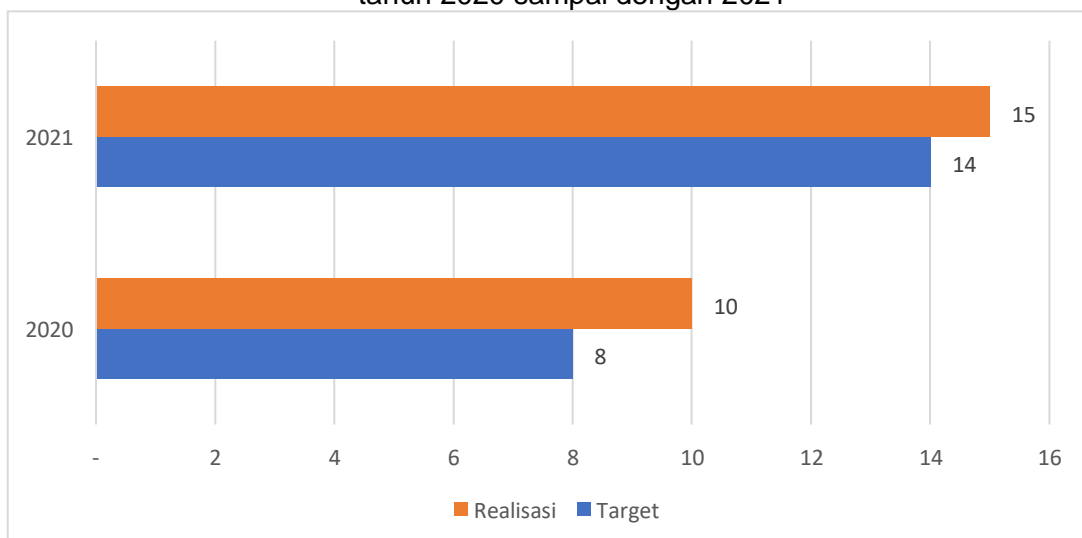
- c. Perbantuan SDM yang bersifat perbantuan langsung dalam upaya penagihan kepada penyerah utang dan juga perbantuan secara administrasi terkait pengelolaan BKPN.

Data historis target dan realisasi IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 sampai dengan 2021 disajikan dalam table 3.8

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 sampai dengan 2021

Uraian	2020	2021
Target	8	14
Realisasi	10	15
Kinerja (%)	125%	107,14%

Gambar 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 sampai dengan 2021



Meskipun kinerja telah melampaui target, namun dari hasil evaluasi masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya

- a. Masih terdapatnya kesalahan dalam Pelaporan Realisasi bulanan, hal ini mengakibatkan tidak akuratnya pengukuran kinerja dan kesulitan menentukan prioritas kegiatan dalam capaian IKU;

Adapun tindak lanjut atas kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Pembinaan-pembinaan SDM pada Sosialisasi pada SDM KPKNL Kisaran dan penyerah utang terkait peraturan-peraturan tentang pengurusan Piutang Negara;
- b. Verifikasi laporan dan penyediaan sistem untuk pengecekan;
- c. Prioritas kepada penyelesaian persuasif dengan menyusun prioritas debitur yang potensial dan penagihan secara langsung serta memanfaatkan media masa untuk melaksanakan panggilan kepada Penanggung Hutang.

Guna menghadapi IKU dimaksud pada tahun 2022, telah disusun rencana kerja sebagai bentuk mitigasi pencapaian target, yaitu:

- a. Mapping atas Piutang Negara
 - 1) Penyampaian Surat Paksa 20 BKPN BPPN
 - 2) Penyampaian Surat Paksa 2 BKPN RSUP Adam Malik
 - 3) Clustering BKPN
 - 4) Penyelesaian 7 BKPN penyerahan dari PKNSI
 - 5) Penelitian lapangan PT. Naufalia Indovision Mandiri Kota Pinang
 - 6) Asset Tracing KSU Tor Sitombor
 - 7) Penggalan potensi piutang K/L dan pemerintah daerah secara lebih intensif.
- b. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara
 - 1) Peningkatan kegiatan administrasi kegiatan pengurusan piutang negara dengan berkoordinasi dengan Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Sumatera Utara, berupa *Updating* data Focus PN, *Update* Kartu Monitor kegiatan PN dan Laporan kegiatan bulanan (Kepdirjen 207/2017);
 - 2) Sosialisasi peraturan terkait pengurusan piutang negara, peningkatan kualitas pelayanan SDM Piutang Negara.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 107,14%.
2. Target tahun 2022 akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi agar kinerja tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Akar masalah:

Tantangan untuk meningkatkan pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dan penagihan piutang negara.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Koordinasi dengan penyerah Piutang telah dilaksanakan pada November 2021

Rekomendasi rencana aksi:

1. Koordinasi dengan penyerah Piutang
2. Mapping potensi piutang Negara dan penyusunan rencana kerja 2022

11. (5b-CP) Persentase produktivitas lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase produktivitas lelang	34%	48,34%	142,18%

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah dengan menetapkan jumlah frekuensi lelang dimana makin banyak frekuensi lelang maka potensi kontribusi penerimaan negara pun makin besar. Adapun indikator ini diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang selama tahun 2021.

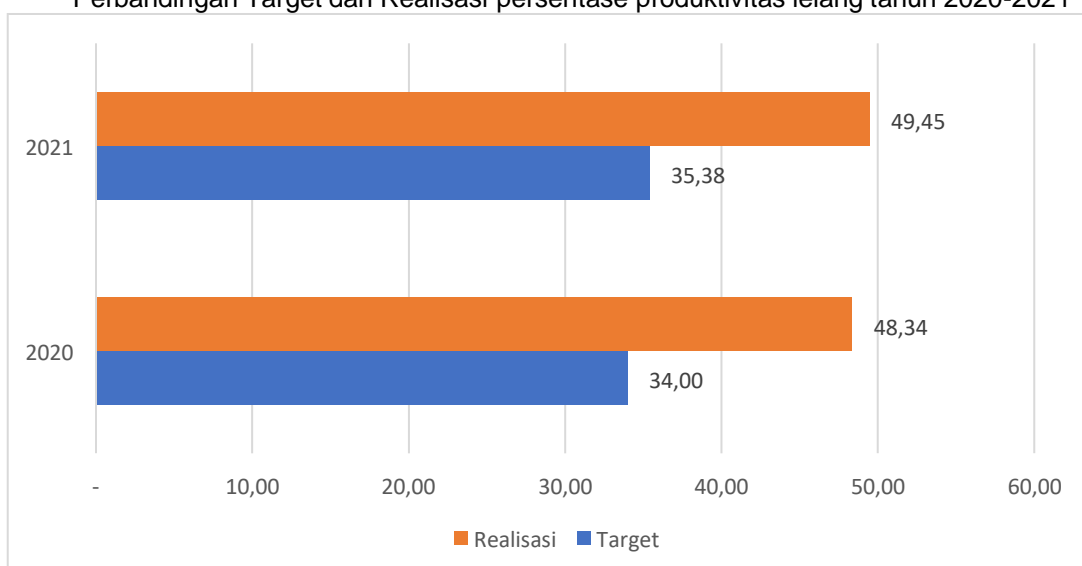
Pada tahun 2021 target frekuensi lelang sebanyak 35,38% dan realisasi pelaksanaan lelang selama tahun 2021 berjumlah 49,45%. Frekuensi lelang berjumlah 457 kali dengan 226 lelang yang laku.

Data historis target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang tahun 2020 sampai dengan 2021 disajikan dalam table 3.9

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021
Target	34%	35,38%
Realisasi	48,34%	49,45%
Kinerja (%)	142,18%	141,29%

Gambar 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2020-2021



Adapun kendala-kendala yang dihadapi sama dengan indikator kinerja terkait dengan persentase produktivitas lelang.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase produktivitas lelang sebesar 141,29%, namun demikian tetap diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisasi tidak tercapainya target lelang
2. Untuk periode Tahun 2022, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang, sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah: potensi lelang TAP

Rekomendasi rencana aksi: koordinasi dengan pemohon lelang setiap bulan.

12. (5c-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	100%	100%

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang, dan 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Implementasi e-auction mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (i) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (ii) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (iii)

menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (iv) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan (v) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Target persentase implementasi *e-auction* terhadap total pelaksanaan lelang tahun 2021 sebesar 100 % dari total frekuensi lelang sebanyak 364 dan terealisasi sebesar 100% (seluruh lelang yang dilaksanakan menggunakan mekanisme *e-auction*).

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase implementasi *e-auction* sebesar 100%.
2. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target trajectory maupun tahunan

Akar masalah: Adanya potensi resistensi pemohon lelang terhadap *e-auction*

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi lelang pada Bulan November 2021
2. Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang pada setiap pengajuan permohonan lelang

Rekomendasi rencana aksi:

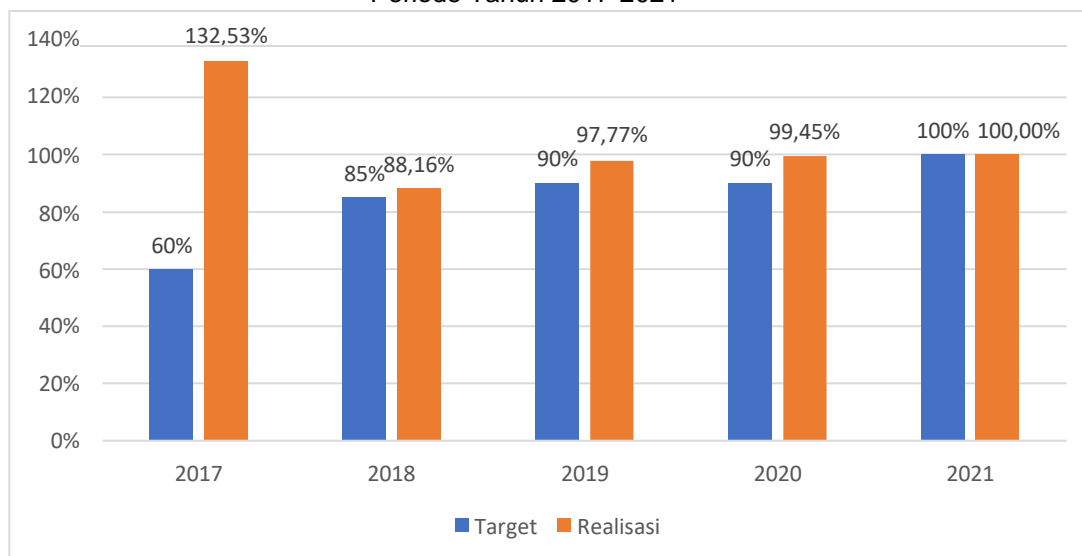
1. Koordinasi dengan pemohon lelang
2. Melaksanakan layanan konsultasi lelang secara intensif
3. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon lelang maupun kepada masyarakat mengenai keuntungan mekanisme *e-auction*
4. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase implementasi *e-auction* pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.10
Tabel perbandingan Realisasi Persentase implementasi *e-auction*
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	60%	85%	90%	90%	100%
Realisasi	132,53%	88,16%	97,77%	99,45%	100%
Persentase (%)	220,88%	103,72%	108,63%	110,5%	100%

Gambar 3.10
Diagram perbandingan Realisasi Persentase Implementasi *e-auction*
Periode Tahun 2017-2021



13. (5d-CP) Deviasi data PNBP fungsional DJKN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi data PNBP fungsional DJKN	12,5%	0,04%	19,66%

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Capaian IKU deviasi data PNBPN fungsional DJKN tahun 2021 adalah 0,04% dari target 12,5% atau secara persentase sebesar 199,66%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu perbedaan data antara pembukuan pada aplikasi dropbox lelang dengan aplikasi OM SPAN. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi data PNBPN fungsional DJKN yang berdampak pada tingkat akurasi penyajian data PNBPN DJKN.

14. (6a-N) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi				90	93,97	104,41%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL Kisaran kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- kualitas materi (bobot 15%),
- kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Tahun 2021 target IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dengan indeks 90 dengan capaian sebesar 93,97 atau secara persentase adalah sebesar 104,41%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yaitu adanya perbedaan pemahaman peserta atas materi yang disampaikan oleh narasumber dan perbedaan kenyamanan selama pelaksanaan sosialisasi. Tindak lanjut yang diambil guna mengatasi kendala tersebut dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta dan dengan memanfaatkan ruang/gedung untuk sosialisasi yang nyaman dengan fasilitas yang lengkap.

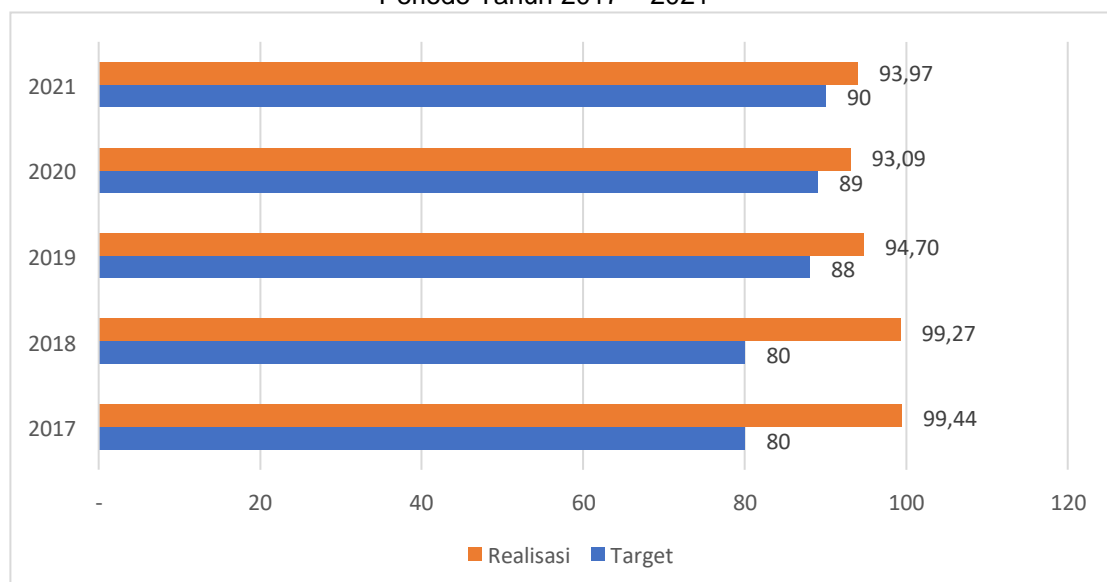
Langkah antisipatif yang diambil untuk periode mendatang dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin timbul untuk pencapaian target IKU ini dengan memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta, penambahan acara/game yang menarik sebagai bagian dari penyegaran kembali peserta sosialisasi, serta melakukan penyusunan *pre-post test* atau *post test* untuk mengukur pemahaman peserta sosialisasi.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.11
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	80	80	88	89	90
Realisasi	99,44	99,27	94,70	93,09	93,97
Persentase (%)	124,3%	124,1%	107,6%	104,59%	104,41%

Tabel 3.11
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Periode Tahun 2017 – 2021



Isu utama dan implikasi:

Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL, hal ini harus diminimalisir agar prosedur dan pendokumentasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akar masalah:

Kesalahan-kesalahan pada prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL berdasarkan hasil verifikasi dan analisa laporan pada KPKNL Kisaran

Tindakan yang telah dilakukan:

Monitoring dan evaluasi ke satuan kerja telah dilaksanakan oleh Subbagian Umum, Seksi PKN, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi PN, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi dan seksi Kepatuhan Internal pada periode November – Desember 2021

Rekomendasi rencana aksi:

1. Koordinasi pada rencana kerja dengan seluruh subbagian umum dan seksi
2. Focus Group Discussion Kepatuhan Internal

15. (7a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	85%	100%	117,65%

Tindak lanjut pengelolaan aset dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan BMN yang baik. Untuk Pengelola Barang, tindak lanjut ini dilakukan meliputi kegiatan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, dan pemindahtanganan BMN.

Target yang ditetapkan IKU yaitu 85% dan realisasi yang berhasil dicapai 100% atau 117,65%.

Isu utama dan implikasi:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L, dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya.
2. Difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.
3. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan kekayaan negara sebesar 117,65%.
4. Capaian atas IKU persentase tindak lanjut pengelolaan asset telah melebihi target *trajectory* (tahunan)

5. Dalam rangka menghadapi target tahun 2022 dan meningkatkan kualitas kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan aset perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait

Akar masalah:

- Potensi satker tidak menindaklanjuti utilisasi atas aset yang telah diterbitkan DJKN
- Tingkat *awareness* satker untuk menindaklanjuti pengelolaan BMN masih rendah, dari sisi historis selama tahun 2021 terdapat satker yang lalai tidak menindaklanjuti dengan alasan nilai sewa terlalu tinggi dan ada juga yang membatalkan sewa kepada calon penyewa dengan alasan yang tiba-tiba pasca terbitnya persetujuan.

Tindakan yang telah dilakukan:

Seksi PKN telah melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset pada Triwulan IV Tahun 2021.

Rekomendasi rencana aksi:

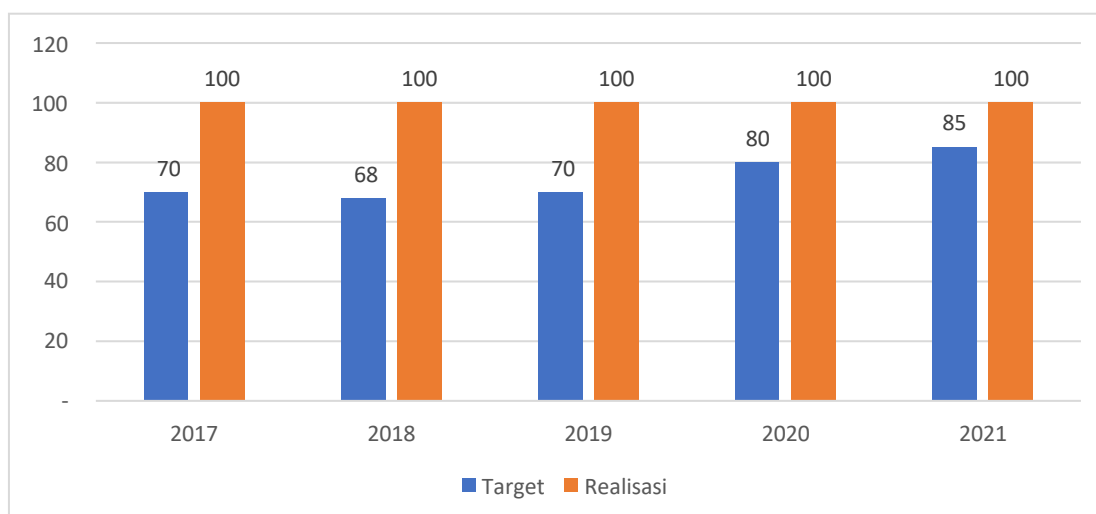
1. Menyampaikan Permintaan dan Penyampaian Laporan Wasdal
2. Melakukan koordinasi ke satker secara berkesinambungan sejak awal tahun 2022 antara lain sewaktu satker berkonsultasi terkait pengelolaan asetnya.
3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.12
Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	70	70	70	80	85
Realisasi	100	100	100	100	100
Persentase (%)	142,86%	142,86%	142,86%	125%	117,65%

Diagram 3.12
Diagram Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara
Periode Tahun 2017-2021



16. (8a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2020.

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara Tugas/Fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/DIV, atau gelar akademik lainnya; maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV).

Pegawai yang memenuhi Standar Jamlat Program Pengembangan Pegawai adalah Pegawai yang telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK,1/2017 selama tahun 2019 dan dengan jumlah minimal jamlat yang telah ditentukan (akumulatif). Program

Pengembangan Kompetensi dimaksud tidak terbatas hanya pada bidang teknis pegawai tersebut. Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:

I. Pengembangan Kompetensi Klasikal (Bimbingan Teknis, Kursus/Short-Course, Pelatihan, Penataran, Workshop, Sosialisasi, Seminar/Konferensi/Lokakarya, Sharing Session, Sarasehan)

II. Pengembangan Kompetensi Non Klasikal (Outbound, Studi Banding/Benchmarking, Belajar mandiri (self Study)/Membaca buku/Mempelajari Aturan, Pelatihan Jarak Jauh/E-learning, Bimbingan di tempat kerja (Coaching atau Mentoring), Secondment/Penugasan untuk mempelajari atau mengevaluasi proses bisnis di suatu unit kerja/Detasering/Praktik Kerja Lapangan (PKL), Pertukaran Pegawai, Penugasan Sementara menduduki jabatan lain di luar jabatannya saat ini tanpa meninggalkan jabatan/tugas dan fungsi utamanya (contoh : menjadi Plh., Plt.), Taskforce/Project Assignment (Penugasan dalam suatu tim untuk menangani tugas atau proyek tertentu/penugasan terkait program prioritas), Mengajar/menjadi narasumber/Memberikan ilmu pengetahuan atau bimbingan pada pihak lain, Job Shadowing, Ekstrakurikuler (penugasan dalam aktivitas semi non-formal, misalnya menjadi ketua pekan olahraga instansi, koordinator acara peringatan hari keuangan, dan lainnya))

Pemenuhan standar kompetensi teknis dan standar minimal jamlat kegiatan pengembangan kompetensi pegawai minimum 24 jamlat (akumulasi).

Keikutsertaan pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dibuktikan melalui

a. Sertifikat

b. Surat keputusan/surat perintah yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan

c. Surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi baik secara individual maupun kelompok diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian, dengan ketentuan:

1) pada kantor pusat diterbitkan paling rendah oleh pejabat eselon II;

2) pada kantor vertikal diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pada tahun 2021, di lingkungan KPKNL Kisaran persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target kinerja 100% atau dengan capaian 120%. Meskipun telah mencapai target kinerja, namun masih terdapat area-area yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam menghadapi tantangan target di tahun 2021, antara lain :

- a. Pegawai tidak dapat/berhalangan mengikuti diklat yang sudah ditetapkan/disetujui;
- b. Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab/*hard competency* di bidangnya;
- c. Pembatalan beberapa diklat karena adanya penghematan anggaran.

Atas hal-hal tersebut telah disusun langkah antisipasi guna menghindari kendala:

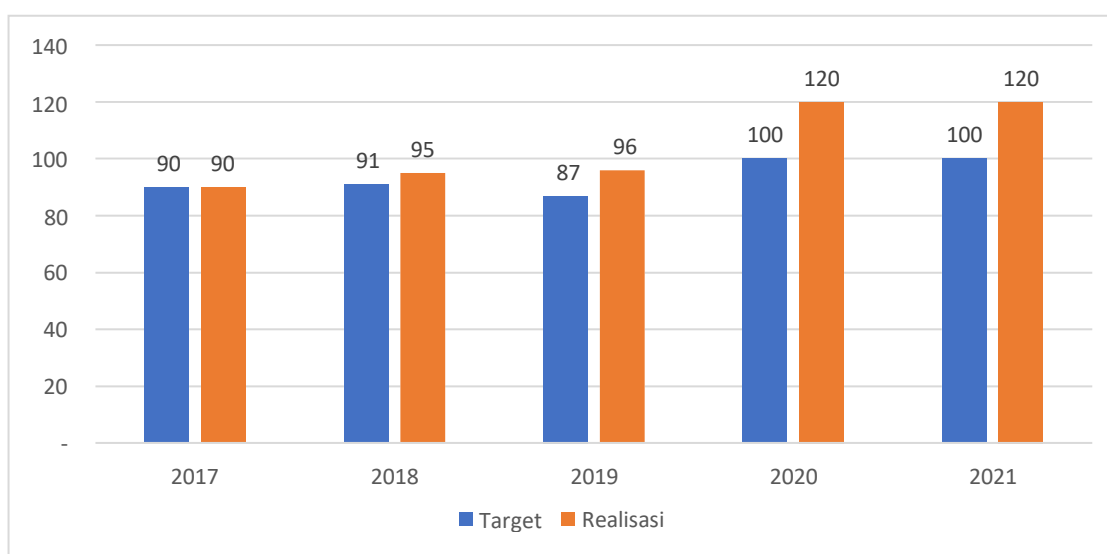
- a. Mengusulkan peserta diklat sesuai dengan *hard competency* masing-masing di seksi terkait;
- b. Memberikan pemahaman secara tertulis kepada setiap pegawai agar dapat memilih diklat yang akan diikuti sesuai *hard competency* di bidangnya;
- c. Rotasi internal pelaksana;

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.13
Tabel perbandingan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	90	91	87	100	100
Realisasi	90	95	96	120	120
Persentase (%)	100%	104,4%	110,34%	120	120

Gambar 3.13
Diagram Perbandingan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
Periode Tahun 2017-2021



17. (9a-N) Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	75	98,33	131,11%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan system penilaian kinerja sebagai bagian dari system pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Keemnterian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah.

Review pengelolaan kinerja berbasis BSC dilaksanakan oleh Kanwil DJKN dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Isu utama dan implikasi:

1. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus dilaksanakan secara berkualitas
2. Pengelolaan kinerja di KPKNL Kisaran harus menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.
3. Pada tahun 2021 target meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2020 dengan target 70) dan diindikasikan bahwa trend target di tahun mendatang akan terus meningkat dan lebih menantang, oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah untuk mendukung pencapaian IKU tersebut.

Akar masalah:

- Masih rendahnya awareness pegawai KPKNL Kisaran terkait pengelolaan kinerja dan masih terdapat anggapan sebagian besar pegawai bahwa pengelolaan kinerja sepenuhnya merupakan tugas seksi KI. Namun sesuai KMK 467/KNK.01/2014, pengelolaan kinerja yang baik merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dimana terdapat kegiatan yang harus dilakukan sendiri oleh pegawai karena menyangkut hak-hak kepegawaian pegawai itu sendiri.
- Potensi pegawai yang tidak memahami IKU dan KK masing-masing
- Penyusunan manual IKU yang tidak tertib
- Kurang maksimalnya edukasi tentang pengelolaan kinerja di subbagian umum dan seksi di KPKNL Kisaran.

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Menyediakan layanan konsultasi penyusunan IKU
2. Menyusun brosur kinerja KPKNL Kisaran pada Bulan Januari 2021
3. Melaksanakan bimtek tentang pengelolaan kinerja ke seluruh seksi dan subbagian umum pada Minggu III Bulan Oktober 2021.

Rekomendasi rencana aksi:

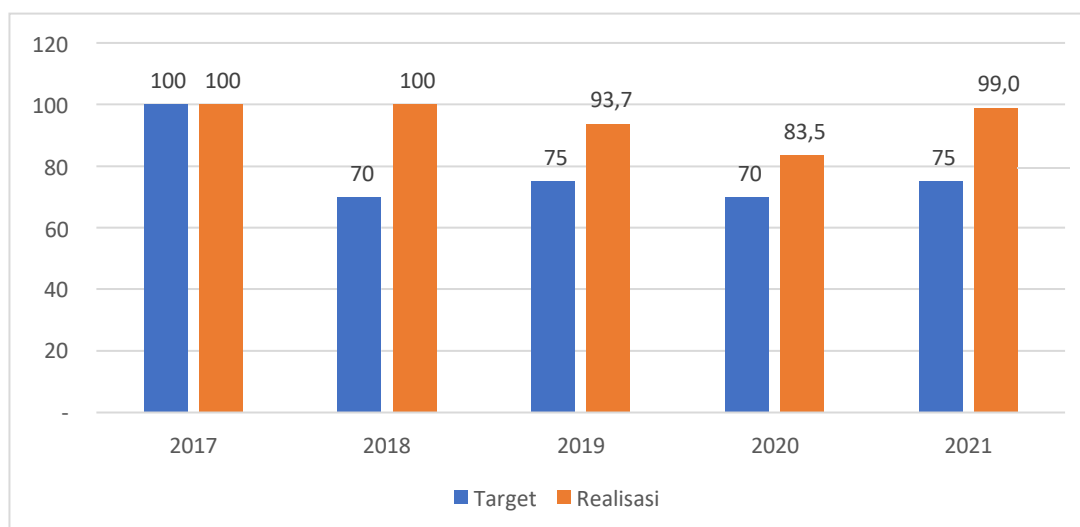
1. Melaksanakan koordinasi kepada Bidang KIH Kanwil DJKN Sumatera Utara selaku SMKO guna mengetahui substansi dan dokumen pendukung dari review yang akan dilakukan
2. Menyusun rencana kerja yang memuat kegiatan dari aspek penilaian pengelolaan kinerja
3. Melakukan internalisasi pengelolaan kinerja secara berkala (triwulanan)
4. Melakukan koordinasi dengan seksi Hukum dan Informasi dalam rangka publikasi terkait informasi pengelolaan kinerja
5. Menyusun bahan edukasi berupa video, infografis, poster yang eye catching dan menarik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kinerja yang telah disepakati bersama dalam DKO sehingga awareness dan kepatuhan para pegawai dapat ditingkatkan.

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.14
Tabel perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100	70	70	70	75
Realisasi	100	100	93,72	83,53	98,33
Persentase (%)	100%	142,86%	124,96%	120%	131,11%

Gambar 3.14
Diagram perbandingan Realisasi Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja
Periode Tahun 2016-2020



18. (9b-N) Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80	98,95	123,69%

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama

Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan 2) kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai)..

Target Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator tahun 2021 sebesar 80. Dari kuesioner yang disebar, didapatkan nilai indeks sebesar 98,95, sehingga secara persentase capaian atas IKU tersebut adalah 123,69%.

Isu utama dan implikasi:

1. Sampai dengan Triwulan IV capaian IKU Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator sebesar 123,69%.
2. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target trajectory maupun tahunan

Akar masalah: Tingkat pemahaman peserta yang berbeda-beda

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Mendistribusikan bahan dokumen FGD sebelum pelaksanaan agar peserta bisa mempelajari isu yang akan dipaparkan
2. Membuka ruang diskusi setelah kegiatan FGD
3. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian target IKU dengan Subbag Umum secara periodisasi.
4. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Rekomendasi rencana aksi:

1. Menyusun timeline pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
2. Membuka ruang diskusi secara berkesinambungan

19. (10a-CP) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Anggaran	Kualitas Pelaksanaan		95,5%	94,90%	99,37%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Adapun tujuan strategis dari IKU ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Pada tahun 2021, KPKNL Kisaran mengelola anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	Rp -	Rp 1.647.717.000	Rp 586.961.000	Rp 2.234.678.000
Realisasi	Rp -	Rp 1.634.942.662	Rp 585.612.500	Rp 2.220.555.162
Persentase	0,00%	99,22%	99,77%	99,37%
Sisa	Rp -	Rp 12.774.338	Rp 1.348.500	Rp 14.122.838

Dengan pengelolaan dana tersebut, KPKNL Kisaran mampu mencapai output dengan rincian sebagai berikut:

Struktur	Uraian	Target Sesuai DIPA	Realisasi
Program	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	625	809
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2	4
KRO	Komunikasi Publik	2	4
RO	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1	2
RO	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	1	2
Kegiatan	Pengelolaan Aset	623	805
KRO	Peraturan lainnya	405	577
RO	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	38	105
RO	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	17	15
RO	Risalah Lelang	350	457
KRO	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	216	226
RO	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	162	162
RO	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	52	62
RO	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	1
RO	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1
KRO	Pengelolaan Aset BUN	2	2
RO	Pengelolaan Aset BUN	2	2
Program	Program Dukungan Manajemen	29	43
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	20	21
KRO	Layanan Hukum	20	21
RO	Advokasi Hukum	20	21,0
Kegiatan	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	4	17
KRO	Komunikasi Publik	4	17
RO	Publikasi	4	17
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	5	5
KRO	Layanan Pengawasan Internal	5	5
RO	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU diantaranya:

- Realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan baru dapat diakui setelah SPM GU menjadi SP2D.

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

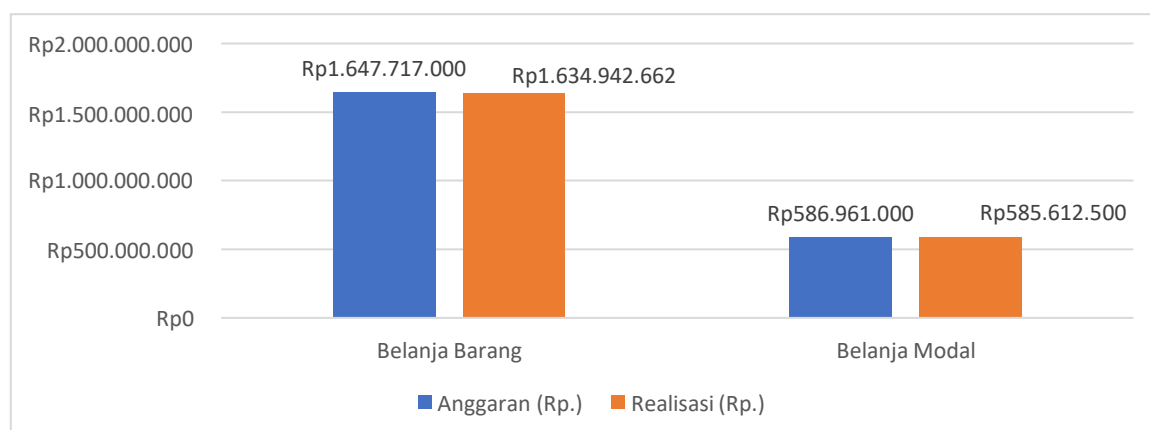
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kepada seksi teknis
- Merevisi rencana pengeluaran dana atas pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran yang merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi setelah dilakukan revisi, realisasi anggaran per jenis belanja pada KPKNL Kisaran tahun 2021 diilustrasikan pada tabel dan diagram di bawah ini:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Barang	1.647.717.000	1.634.942.662
Belanja Modal	586.961.000	585.612.500

Gambar 3.15

Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja TA 2021

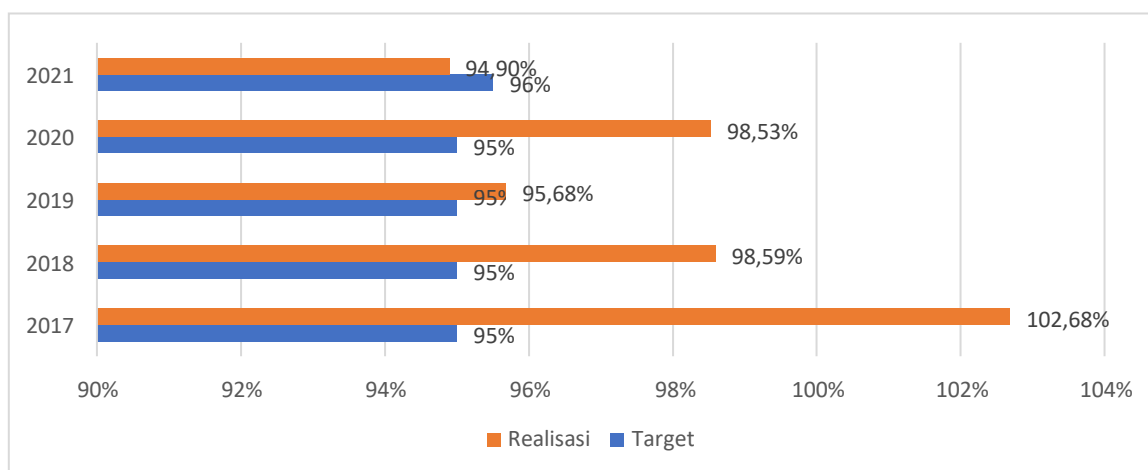


Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Kisaran tahun 2017 sampai dengan 2021 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.15
Tabel perbandingan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target	95%	95%	95%	95%	95,5%
Realisasi	102,68%	98,59%	95,68%	98,53%	94,90%
Persentase (%)	108,08%	103,78%	100,72%	103,72%	99,37%

Gambar 3.16
Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017 - 2021

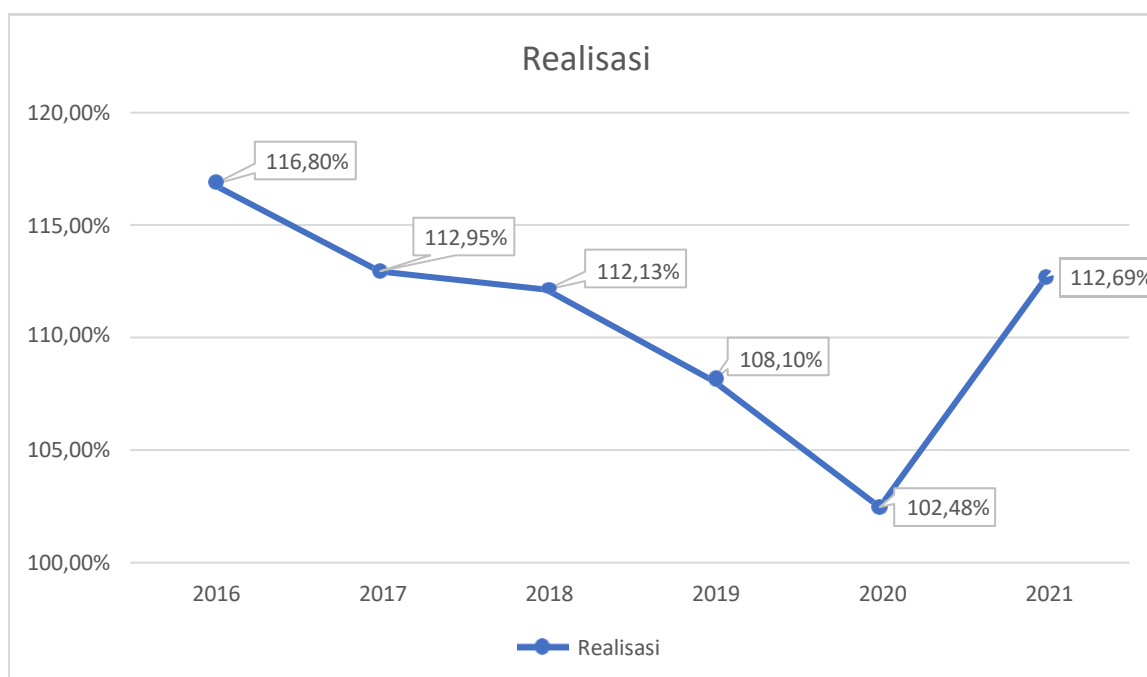


BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2021 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,69%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran



Grafik pada gambar 4.1 mengilustrasikan perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2021. Selama kurun waktu 2016 s.d 2020, dari sisi tren NKO mengalami penurunan, namun di tahun 2021 NKO mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu, dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2021, KPKNL Kisaran menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Namun, kendala dan permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan dilakukannya penanganan segera terhadap permasalahan yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan secara umum dapat dicapai.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*, dengan rincian sebagai berikut:

A. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
3. Meningkatkan pelaksanaan frekuensi maupun kualitas *knowledge sharing* dan *focus group discussion* terkait pengelolaan kekayaan negara;
4. Meningkatkan penyediaan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN.

B. Seksi Piutang Negara

1. Penggalian Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen dan tata cara penyerahan;
3. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

C. Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko KPKNL Kisaran;
2. Mengadakan forum kinerja dilingkup KPKNL;
3. Peningkatan kegiatan pengendalian internal terhadap seluruh layanan KPKNL;
4. Peningkatan pemantauan kode etik pegawai dan Area Pelayanan Terpadu KPKNL;
5. Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas pada KPKNL sebagai sarana evaluasi peningkatan layanan KPKNL
6. Melaksanakan konfirmasi kepada para stakeholder dalam rangka mitigasi risiko fraud
7. Melaksanakan kegiatan sinergi yang lebih efektif antar seksi/subbagian umum;

D. Seksi Hukum dan Informasi

1. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.
2. Peningkatan penyediaan dan pemberian informasi public

3. Peningkatan kualitas dan percepatan layanan kebendaharaan penerimaan

E. Subbagian Umum

1. Optimalisasi analisis beban kerja dalam rangka pemetaan ketersediaan pegawai dan beban kerja masing-masing seksi/subbag umum
2. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
3. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
4. Penajaman program dan kegiatan kerja;
5. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

F. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

1. Peningkatan kapasitas Penilai yang dilakukan secara berkala;
2. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
3. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

G. Jabatan Fungsional Pelelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dilingkup KPKNL Kisaran;
3. Membangun database bidang lelang;
4. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di seksi lelang;
5. Koordinasi dengan Bidang Lelang Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam rangka pemeriksaan risalah lelang dan pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
6. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di seksi lelang;
7. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang *via e-auction*.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2021.

Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2021 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan

peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kontrak Kinerja,
Addendum Kontrak Kinerja
& Pengukuran Kinerja
KPKNL Kisaran 2021



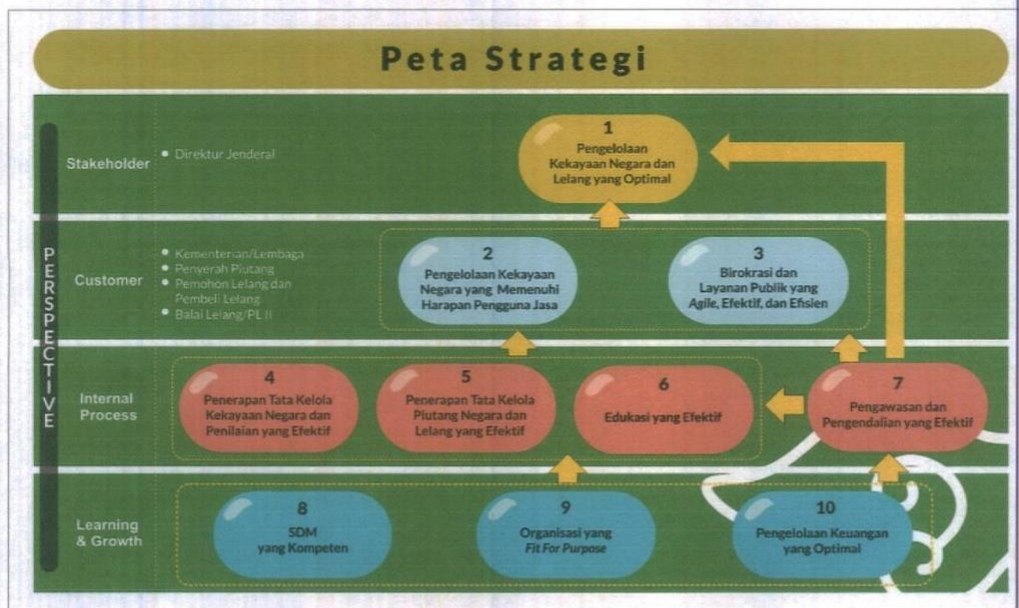
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 9.1/KN.14/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,8
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	82
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 78.362.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.6.216.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp.72.146.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp.5.100.000
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	Rp.2.156.316.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp.13.872.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.2.130.296.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.404.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.11.744.000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp. 78.362.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp.6.216.000

Kisaran, 04 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Utara

Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Kisaran

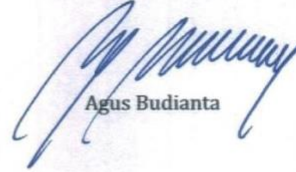
Agus Budianta

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	-	-	-	-	1%	1%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	-	-	-	87	87
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	-	-	4,45%	4,45%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,8	4,8
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	-	-	-	-	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	-	-	-	-	-	14,29%	14,29%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	-	-	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	-	-	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	90	90
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	-	1,13%	1,13%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	82	82
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%

Kisaran, 04 Oktober 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Kisaran



Agus Budiarta

Pengukuran Kinerja KPKNL Kisaran 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29,03%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							116,13%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	85,71%	19%	40%	138,234%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	159,28%	14%	30%	159,277%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	107,0%	14%	30%	107,01%	107,01%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,16%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							113,41%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	87	91,37	11%	44%	105,02%	105,02%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	139,43%	14%	56%	139,43%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							102,08%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,8	4,90	21%	100%	102,08%	102,08%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,55%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							111,36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	19%	43%	100,00%	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	135,71%	11%	25%	135,71%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1,42%	14%	32%	193,55%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,96%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	107,14%	14%	25%	107,14%	107,14%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	49,45%	14%	25%	141,29%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,04%	14%	25%	199,66%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							104,41%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	93,97	14%	100%	104,41%	104,41%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							117,65%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100,00%	14%	100%	117,65%	117,65%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,94%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	98,33	14%	50%	131,11%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	98,95	14%	50%	123,69%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							99,37%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,90%	14%	100%	99,37%	99,37%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,69%	hijau

Dokumentasi Kegiatan KPKNL Kisaran



Lelang BMN berupa 11 unit kendaraan bermotor roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua di Pemkab Batubara menghasilkan penjualan melalui lelang sebesar Rp358,7 juta (10 Mei 2021)



Lelang BMN berupa 6 unit kendaraan bermotor roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua di Pemkab Batubara menghasilkan penjualan melalui lelang sebesar Rp81,7 juta (13 Juli 2021)



Kegiatan Sosialisasi Pra Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Tahun 2022 (2 Desember 2021)



Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani KPKNL Kisaran (30 November 2021)



Kegiatan In House Training Peningkatan Kompetensi Manajerial Pegawai DJKN 2021 (19 Oktober 2021)



Kegiatan FGD Administrator Triwulan IV Tahun 2021 (1 Desember 2021)